

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 1

N o	Judul Penulis Tahun	Afiliasi Universitas	Metode Penelitian	Kesimpulan	Saran	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1	Analisis Framing Berita Kekerasan Seksual pada Anak di Kompas.id Bulan Januari – Juni 2018 Puji Suryani 2019	Institut Agama Islam Negeri Purwokerto	Analisis framing Robert N Entman	Kompas.id melakukan pemberitaan kekerasan seksual pada anak cenderung lebih fokus oleh peristiwa sebagai hukum dan kemanusiaan	Setelah membaca berita mengenai kekerasan seksual pada anak, media sebagai konsumsi masyarakat diharapkan dapat mempengaruhi masyarakat agar bisa lebih waspada terhadap kasus tersebut. Pada penelitian ini tidak ada saran untuk penelitian lanjutan.	Penelitian ini menggunakan perangkat framing milik Robert N Entman dan tidak melakukan komparasi dua media

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu 2

No	Judul Penulis Tahun	Afiliasi Universitas	Metode Penelitian	Kesimpulan	Saran	Perbedaan dengan Penelitian Ini
2	Implementasi Panduan Pemberitaan Ramah Anak di Tribunnews.com Sri Mustika & Rita Pranawati 2021	Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA	Kualitatif deskriptif	Pemberitaan tentang kekerasan anak di Tribunnews.com dinilai sudah mengimplementasikan PPRA yang dapat memantau pemberitaan tentang anak supaya tetap dalam kerangka perlindungan anak	Dewan pers perlu memberi pelatihan jurnalistik dalam penerapan PPRA dengan perspektif perlindungan anak. Orang tua juga didorong untuk berani melaporkan wartawan dan media yang tidak mematuhi PPRA ke Dewan Pers.	Penelitian ini tidak melakukan komparasi media dan hanya meneliti satu berita secara mendalam saja.

Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu 3

No	Judul Penulis Tahun	Afiliasi Universitas	Metode Penelitian	Kesimpulan	Saran	Perbedaan dengan Penelitian Ini
3	Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Komunikasi Massa (<i>Protection of the Rights of Child With Mass Communication Perspective</i>) Dedi Sahputra 2019	Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi “Pembangunan” Medan	Kualitatif deskriptif	Dalam perspektif komunikasi massa, perlindungan hak anak berkonflik hukum di media massa, wartawan tidak boleh menyebarkan informasi mengenai anak berkonflik hukum baik sebagai korban, tersangka, maupun saksi. Terdapat ancaman pidana jika adanya pelanggaran.	Disarankan untuk melakukan penyempurnaan undang-undang yang memenuhi persyaratan juridis sebagai <i>lex specialis</i>	Penelitian ini melihat fenomena anak di pemberitaan media melalui kaca mata hukum bukan dari sudut pandang komunikasi

Dalam menyusun penelitian ini, diperlukan pula penelitian terdahulu terkait sebagai acuan melakukan penelitian. Komparasi penerapan konsep jurnalisme *online* yang dikaitkan dengan etika jurnalistik akan diteliti menggunakan perangkat analisis *framing* Pan dan Kosicki. Dari penelitian terdahulu yang sudah dikumpulkan, terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian ini dengan perbandingan sebagai berikut;

1. Perbandingan dengan penelitian dengan judul “Analisis Framing Berita Kekerasan Seksual pada Anak di Kompas.id Bulan Januari – Juni 2018” yang ditulis oleh Puji Suryani pada tahun 2019. Penelitian tersebut sama-sama menggunakan analisis *framing* namun terdapat perbedaan pada perangkat analisis *framing* yang digunakan. Penelitian tersebut menggunakan perangkat analisis *framing* milik Robert N. Entmant, sedangkan penelitian ini menggunakan perangkat analisis *framing* milik Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Penelitian tersebut juga hanya menggunakan satu media saja tanpa pembanding.

2. Perbandingan dengan penelitian dengan judul “Implementasi Panduan Pemberitaan Ramah Anak di Tribunnews.com” yang ditulis oleh Sri Mustika & Rita Pranawati pada tahun 2021. Seperti perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini hanya menggunakan satu media tanpa perbandingan, sedangkan penelitian ini menggunakan dua media untuk perbandingan. Penelitian tersebut juga menggunakan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) sebagai acuan penelitian, sedangkan penelitian ini menggunakan pedoman internasional yang dikeluarkan oleh *International Federation of Journalists*.
3. Perbandingan dengan penelitian dengan judul “Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Komunikasi Massa (*Protection of the Rights of Child With Mass Communication Perspective*)” yang ditulis oleh Dedi Sahputra pada tahun 2019. Penelitian tersebut selain berfokus pada masalah komunikasi, juga berfokus pada hukum yang berlaku seperti Undang-Undang Pers dan konsekuensi pidana jika ada pelanggaran, sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada masalah komunikasi, yaitu penerapan konsep jurnalistik yang berkaitan dengan etika jurnalistik secara internasional.

2.2 Teori dan Konsep

2.2.1 Jurnalisme Online

Di era globalisasi saat ini, jurnalisme dapat dilakukan secara daring atau *online*. Berita dapat disajikan dalam berbagai bentuk melalui berbagai saluran. Berita dapat dipublikasikan dalam berbagai saluran seperti cetak, siaran, bahkan digital. Selain itu, berita juga dapat dipublikasikan dalam berbagai bentuk mulai dari tulisan hingga gambar.

Jurnalisme *online* memiliki kekuatan karena menawarkan berita yang dapat diakses oleh siapapun dan dimanapun sehingga pembaca dapat memilih berita yang ingin dikonsumsi lebih leluasa. Selain itu pembaca juga dapat mengakses dengan mudah menggunakan perangkat telepon genggam maupun komputer yang memiliki akses internet yang saat ini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Foust

dalam (Muliawati, 2018) menyebutkan bahwa terdapat beberapa kekuatan dari jurnalisme *online*, yaitu;

1. *Audience control*, yaitu audiens lebih leluasa dan bebas memilih berita yang ingin dikonsumsi
2. *Nonlienarity*, yaitu setiap berita yang dipublikasikan bisa berdiri sendiri
3. *Storage and Retrieval*, yaitu dapat tersimpan dan diakses kembali dengan mudah
4. *Unlimited space*, yaitu jumlah berita yang dipublikasikan lebih lengkap
5. *Immediacy*, yaitu berita disampaikan dengan cepat dan langsung
6. *Multimedia capability*, yaitu berita dapat disertakan teks, suara, gambar, video, atau komponen lain
7. *Interactivity*, yaitu memungkinkan untuk terdapat interaksi

- Meskipun berita dapat dipublikasikan dalam berbagai bentuk dan melalui berbagai saluran, sebuah artikel berita harus tetap mengandung unsur-unsur berita. Maka dari itu, tak semua laporan peristiwa dapat diangkat menjadi berita yang kemudian dipublikasikan secara luas. Dengan memenuhi unsur-unsur berita, sebuah peristiwa dapat memiliki nilai dan tidak sembarang informasi yang diangkat dan disebarkan kepada khalayak.

Terdapat tujuh unsur berita (Wendratama, 2017), di antaranya adalah;

1. Fokus
Merupakan unsur yang paling penting dalam suatu berita karena merupakan pokok pikiran sebuah berita. Fokus juga merupakan acuan atau dasar dari sebuah berita, mulai dari judul hingga penutup berita yang harus berkaitan.
2. Fakta
Berita yang hendak disajikan wajib untuk mengandung kebenaran dan fakta yang akurat. Dengan itu, harus dilakukan verifikasi atau menguji fakta dari sebuah peristiwa.
3. Nilai Berita
Suatu peristiwa atau fakta harus bernilai berita, yaitu:
 - a. Kebaruan (*Timeliness*)

Berita harus baru dan belum diketahui oleh publik. Namun, kebaruan pada berita juga bersifat relatif yang bergantung pada kedalaman isi berita serta sifatnya. Berita sederhana yang singkat dituntut lebih memiliki kebaruan daripada berita yang kompleks yang panjang.

b. Pengaruh (*Impact*)

Sebagian besar berita yang dipublikasikan mengandung unsur ini, yaitu apa pengaruh sebuah fakta yang disajikan menjadi berita kepada publik, khususnya target utama sebuah situs berita. Sumber yang digunakan juga biasanya merupakan orang penting yang berkaitan dengan fakta tersebut. Unsur ini biasanya bersifat penting tetapi tidak menarik.

c. Relevansi (*Relevance*)

Fakta atau peristiwa yang relevan dengan kehidupan publik bisa disebut bernilai berita dan biasanya diminati oleh khalayak.

d. Konflik (*Conflict*)

Tak dapat disangkal, publik biasanya cenderung tertarik dengan berita yang mengandung unsur konflik. Hal tersebut merupakan sifat alamiah bagi manusia unyuk memihak salah satu pihak dalam konflik dan mencari informasi yang dapat mendukung pilihan tersebut.

e. Popularitas (*Prominence*)

Publik cenderung tertarik dengan sebuah fakta atau peristiwa yang melibatkan orang-orang yang memiliki popularitas atau terkenal daripada warga biasa.

f. Emosi (*Human Interest*)

Peristiwa yang dapat memicu reaksi emosional (senang, marah, terharu, dll) juga merupakan aspek yang kuat dalam pembuatan berita.

g. Ketidakwajaran (*Unusualness*)

Fakta yang merupakan peristiwa tidak biasa dan di luar kewajaran juga memiliki daya tarik yang cukup besar dari sebuah berita.

h. Kedekatan Jarak (*Proximity*)

Kedekatan jarak yang dimaksud adalah tempat lokasi dari pelaku atau kegiatan yang diberitakan. Publik cenderung lebih tertarik dengan berita

yang lokasi kejadiannya dekat dengan mereka secara jarak. Namun di era digital ini, kedekatan jarak sudah tidak sepenting dulu.

4. Jawaban

Berita harus mengandung unsur 5W+1H yang dapat memuat jawaban dari sebuah peristiwa yang diberitakan.

5. Sumber

Berita harus memiliki sumber terpercaya yang dapat dijadikan ladang informasi mengenai suatu berita. Informasi yang dikeluarkan oleh sumber terpercaya dapat diolah menjadi berita yang penting untuk dipublikasikan. Maka dari itu, penting bagi jurnalis untuk melakukan verifikasi sumber agar berita dapat dipublikasikan dengan isi berita yang penting dan akurat, bukan hanya sekedar penting saja.

6. Kejelasan

- Berita dalam bentuk apapun, baik tulisan, gambar, maupun audiovisual harus disajikan dengan jelas agar berita dapat tersampaikan ke publik secara tepat.

7. Etika

Setiap peristiwa yang diberitakan juga harus menerapkan etika jurnalisme, yaitu terpercaya, adil, dan dapat membantu publik memahami peristiwa.

Etika jurnalistik pun tak luput dilakukan oleh para jurnalis ketika hendak membuat sebuah pemberitaan. Berikut merupakan etika jurnalis internasional yang dikeluarkan oleh *International Federation of Journalists* (International Federation of Journalists, 2019);

1. Hormati fakta dan hak publik atas kebenaran
2. Jurnalis harus mempertahankan prinsip kebebasan dalam proses pembuatan berita serta hak komentar dan kritik yang adil serta memastikan informasi faktual dari komentar dari kritik
3. Jurnalis hanya boleh melaporkan peristiwa sesuai fakta yang mereka ketahui asal-usulnya dan tidak boleh menyembunyikan informasi yang bersifat penting atau memalsukan dokumen

4. Jurnalis harus menggunakan cara yang adil untuk memperoleh informasi, data, dokumen, dan gambar dengan statusnya sebagai jurnalis dan tidak boleh secara sembunyi merekam gambar atau suara (kecuali jika tidak mungkin untuk mengumpulkan informasi untuk kepentingan umum), jurnalis akan menuntut kebebasan untuk mengakses informasi untuk kepentingan umum
5. Urgensi atau kesegeraan dalam diseminasi informasi tidak dapat didahulukan sebelum adanya verifikasi fakta, sumber, atau tawaran menjawab
6. Jurnalis harus memaksimalkan untuk memperbaiki kesalahan informasi yang telah dipublikasikan
7. Jurnalis harus secara profesional merahasiakan identitas sumber informasi yang diperoleh secara rahasia pula
8. Jurnalis harus menghormati privasi dan martabat orang yang diliput
9. Jurnalis harus memastikan bahwa penyebaran berita tidak memicu kebencian atau prasangka serta menghindari penyebaran berita yang memicu diskriminasi atas dasar SARA dan sebagainya
10. Jurnalis harus menghindari pelanggaran profesional seperti plagiarisme, distorsi fakta, dan fitnah atau pencemaran nama baik (tuduhan tidak berdasar)
11. Jurnalis dilarang untuk bertindak sebagai “pembantu” bagi para satuan keamanan
12. Jurnalis harus menunjukkan solidaritas terhadap rekan sejawat tanpa menghilangkan kebebasan dalam melakukan investasi, kewajiban untuk menyebarkan informasi, serta hak untuk terlibat dalam sebuah komentar, kritik, satir, dan pilihan editorial
13. Jurnalis dilarang untuk menggunakan kebebasan pers untuk melayani kepentingan lain untuk kepentingan pribadi
14. Jurnalis tidak melakukan aktivitas apapun yang dapat membahayakan independensinya
15. Jurnalis yang baik akan menganggap mematuhi prinsip-prinsip tersebut sebagai tugas mereka tanpa paksaan

16. Dalam hukum masing-masing negara wartawan harus peka terhadap kehormatan profesional, yuridiksi badan pengatur independen yang terbuka untuk publik dengan tidak mencampurkan segala bentuk campur tangan pemerintah atau pihak lain

Penelitian ini menggunakan berita *online* sebagai unit analisis. Dengan itu, subjek yang digunakan pun merupakan media *online*, yaitu Kompas.com dan ABCNews.go.com. Dalam pembuatan beritanya, kedua media tersebut sudah memenuhi karakteristik media *online* seperti yang dijelaskan di atas. Kedua media tersebut dalam menyajikan berita juga harus mengandung unsur-unsur berita, walaupun tidak mencakup semua unsur.

2.2.2 Media Online

Secara definisi, media *online* merupakan media yang disajikan secara daring atau *online* di situs web internet (Romli, 2018). Menurut Pedoman Pemberitaan Media Siber oleh Dewan Pers, media siber atau media *online* merupakan segala bentuk media untuk melaksanakan kegiatan jurnalistik di internet, dengan memenuhi persyaratan yang terdapat pada Undang-Undang Pers serta Standar Perusahaan Pers yang telah ditetapkan oleh Dewan Pers. Media *online* dapat disebut media generasi tiga yang turun setelah media cetak dan media elektronik (Romli, 2018).

Dalam perspektif komunikasi massa, media *online* merupakan salah satu objek pada media baru, yaitu istilah bagi konten yang dapat diakses di mana pun, kapan pun, di setiap perangkat digital dan interaktif (Romli, 2018). Pada media ini dapat terbentuk suatu komunitas. Selain itu konten yang diangkat pada media ini bisa dikatakan *real-time* atau sesuai dengan kapan konten itu ditayangkan (Romli, 2018).

Menurut Romli (2018), media *online* dapat diklasifikasikan menjadi lima kategori, yaitu;

1. Situs berita edisi *online* media cetak
2. Situs berita edisi *online* media penyiaran radio

3. Situs berita edisi *online* media penyiaran televisi
4. Situs berita *online* murni dan tidak berkaitan dengan media cetak atau elektronik
5. Situs indeks berita berisi link berita dari situs lain

Pada bukunya, Romli (2018) juga mengungkapkan karakteristik media *online* yang juga merupakan keunggulan daripada media konvensional, yaitu;

1. Multimedia
Dapat memuat informasi dalam segala bentuk mulai dari teks, audio, video, dan lainnya secara langsung.
2. Aktualitas
Informasinya bersifat aktual karena penyajian yang lebih mudah dan cepat.
3. Cepat
 - Berita dapat langsung diakses semua orang saat itu juga pada saat berita sudah ditayangkan.
4. *Update*
Pembaruan informasi dilakukan secara cepat baik secara konten maupun redaksional. Informasi disampaikan terus-menerus.
5. Kapasitas Luas
Satu halaman *web* dapat menampung naskah panjang tanpa batas.
6. Fleksibilitas
Naskah dapat disunting atau dimuat kapan dan di mana saja, begitu juga dengan jadwal terbit yang bisa setiap saat.
7. Luas
Jangkauan luas hingga seluruh dunia selama memiliki akses internet.
8. Interaktif
Difasilitasi kolom komentar dan ruang obrolan sehingga bisa berinteraksi lebih mudah.
9. Terdokumentasi
Informasinya tersimpan dan mudah ditemukan.

10. *Hyperlinked*

Mudah terhubung dengan sumber lain terkait dengan informasi yang sedang diakses.

Dalam penelitian ini, unit analisis diambil dari media *online* yang berasal dari dua negara berbeda, yaitu Indonesia dan Amerika Serikat. Media yang digunakan adalah Kompas.com dan ABCNews.go.com yang mana keduanya telah memenuhi karakteristik media *online*.

2.2.3 Sistem Pers

Falsafah adalah tata nilai yang berdasarkan pada pemikiran atau ideologi suatu bangsa yang dapat membentuk sikap atau cara hidup masyarakatnya. Cara hidup tersebut dapat mempengaruhi sistem pers yang dianut sebuah negara. Karena pada dasarnya pers lahir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka pers dijadikan lembaga kemasyarakatan (Asti Musman, 2017).

Oleh karena itu, pers dapat dipengaruhi dan mempengaruhi lembaga kemasyarakatan lainnya. Dari itu, tata kerja, isi pesan siaran, hingga cara melakukan kontrol sosial juga tergantung pada cara hidup atau falsafah yang dianut masyarakatnya sehingga lahirlah beberapa sistem pers menurut Widodo (1997) pada (Asti Musman, 2017), antara lain;

1. Sistem Pers Kapitalis

Sistem pers ini dianut pula oleh negara yang menganut paham kapitalisme sebagai ideologi nasionalnya. Pada sistem ini, keberadaan pers di masyarakat berfungsi untuk memperkuat dan mendukung gerakan kapitalisme. Kehidupan pers pada negara tersebut diselenggarakan oleh para pihak swasta pemilik modal. Hal itu dapat mempersulit pemerintah melakukan kontrol sosial terhadap pers karena sudah dikuasai oleh pemodal yang menuntut adanya balik modal sehingga pers merupakan media bisnis bernilai strategis.

2. Sistem Pers Liberal

Sistem pers ini dianut oleh negara yang menggunakan paham liberal sebagai ideologinya. Pada negara tersebut, pers dikatakan lebih berkembang karena

adanya kebebasan pers. Fungsi kontrol sosial pada pers pun nyata berlaku secara bebas baik kritik kepada pemerintah maupun perorangan. Dalam sistem ini, pemerintah tidak dapat mengendalikan pers sehingga produk berita tidak bisa dikatakan mencerminkan pemerintahnya. Tidak ada pemodal yang lebih unggul pada sistem pers ini.

3. Sistem Pers Komunis

Sistem pers ini dianut oleh negara komunis pula. Di negara tersebut, pers menjadi lembaga yang merupakan alat perjuangan untuk memperkokoh paham komunias yang ada. Pemberitaan yang disajikan juga merupakan manifestasi dari ideologi komunis itu sendiri. Pada sistem ini pers adalah bagian dari lembaga pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah dan menerima modal dari pemerintah pula. Maka dari itu, pers ini merupakan alat perjuangan pemerintah dengan kebebasan pers dan kontrol sosial yang sangat minim karena semua sudah diatur pemerintah.

4. Sistem Pers yang Bertanggung Jawab Sosial

Sistem pers ini merupakan penggabungan dari sistem-sistem pers yang ada yang kemudian diformulasikan untuk mengemban nilai yang sesuai dengan kodrat yang dimiliki manusia. Sistem ini juga melahirkan gagasan Kebebasan yang berarti kebebasan tidak berlaku mutlak karena masih disertai oleh rasa tanggung jawab secara manusiawi dan gagasan Tanggung Jawab di mana pers diberi kebebasan yang bertanggung jawab terhadap satu sama lain dengan masyarakat.

2.2.4 Kepemilikan dan Kebijakan Redaksional

Kebijakan redaksional merupakan dasar pertimbangan bagi lembaga media massa untuk mempublikasikan suatu berita (Benazir, 2015). Menurut Sudirman Tebba dalam (Benazir, 2015), kebijakan redaksi penting karena dapat digunakan untuk merespon dan menyikapi peristiwa karena sejatinya pemberitaan tidak hanya peristiwa tetapi juga sikap terhadap peristiwa tersebut. Dalam kata lain, kebijakan redaksional dapat menjadi pedoman bagaimana sebuah media menyikapi suatu peristiwa hingga akhirnya dijadikan sebuah pemberitaan.

Haris Sumadiria dalam (Benazir, 2015) mengatakan bahwa kebijakan redaksional cenderung memiliki perhatian yang berpusat pada bagaimana aspek dan misi yang ideal dijabarkan di dalam peliputan dan penempatan berita, tulisan, dan sebagainya yang disesuaikan dengan kepentingan serta selera publik yang beragam. Adanya kebijakan redaksional berarti menjadi penanda perbedaan antar media. Media yang tidak memiliki kebijakan redaksional akan tidak konsisten dalam menyampaikan berita-beritanya yang akan selalu berubah-ubah.

Menurut Abdullah dalam (Benazir, 2015), kebijakan redaksional juga meliputi “politik” media atau aturan dalam keredaksian kewartawanan. Ia mengatakan politik yang dimaksud bukan hanya pada partai politik. Politik yang dimaksud adalah kecenderungan terhadap kepentingan lain. Kepentingan tersebut dapat berhubungan dengan kepemilikan media, sejarah media, misi media, dan kepentingan lainnya.

Penelitian ini menggunakan media Kompas.com dan ABCNews.go.com. Kompas.com merupakan media *online* yang berdiri pada tahun 1995 di bawah naungan Kompas Gramedia Group. Sedangkan ABCNews.go.com merupakan media *online* yang berdiri di bawah naungan perusahaan Disney. Kedua media tersebut merupakan media yang berdiri di bawah perusahaan swasta besar di masing-masing negara asal mereka. Hal tersebut dapat mempengaruhi bagaimana kebijakan redaksional kedua media dibentuk. Kebijakan redaksional tersebut lah yang kemudian akan membentuk bagaimana masing-masing media membingkai dan menyajikan sebuah peristiwa menjadi suatu pemberitaan.

2.2.5 Konstruksi Sosial pada Media

Dalam membuat sebuah pemberitaan, media tentu memiliki tujuan dan motif di baliknya. Motif tersebut dapat berbentuk nilai yang ingin ditanamkan oleh media kepada para publiknya (Chairani & Kania, 2014). Pada dasarnya, manusia memang memiliki sebuah kesempatan dan kemampuan dalam menyerap pesan secara kognisi (Tamburaka, 2012). Perubahan kognitif yang dialami individu juga dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi perubahan sikap dalam

memahami suatu peristiwa. Oleh karena itu, media juga berperan dalam menyampaikan informasi yang aktual dan faktual yang dapat membangun nilai dalam pikiran khalayak pembaca (Chairani & Kania, 2014).

Konstruksi sosial pun diciptakan oleh media massa melalui berbagai tahapan, salah satunya adalah konstruksi realitas (Santoso, 2016). Tahapan-tahapan dalam pembentukan konstruksi realitas sebagai berikut;

1. Tahapan pembentukan konstruksi realitas

Pada tahap ini, pemberitaan telah diterima oleh khalayak atau pembacanya, yaitu telah terjadi pembentukan konstruksi melalui tiga tahap, yaitu;

- a. Pertama, konstruksi realitas yang mengandung membenaran yang cenderung memberi membenaran atas apa saja yang sudah terjadi di media sebagai suatu realitas atau kebenaran yang terjadi.
- b. Kedua, pembaca atau khalayak media bersedia untuk dikonstruksi oleh media massa.
- c. Ketiga, memilih konsumsi media massa sebagai sebuah pilihan di mana individu menjadi ketergantungan pada media massa.

Realitas sosial dapat dibentuk melalui media. Melalui konsep ini, peneliti dapat menemukan bagaimana masing-masing media dapat mengkonstruksi realitas sosial melalui cara mereka menyajikan berita. Kompas.com dan ABCNews.go.com merupakan dua media yang memiliki latar budaya berbeda. Maka dari itu, konsep ini dapat menunjang penelitian dengan melihat bagaimana kedua media tersebut melakukan tahapan dalam mengkonstruksi realitas sosial.

2.2.6 Framing

Framing merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif (cara pandang) yang digunakan oleh jurnalis atau wartawan pada saat mereka memilih isu yang kemudian diproses untuk menjadi sebuah berita yang akan disajikan kepada pembaca (Eriyanto, 2012). Dengan begitu, jurnalis dapat menjadi penentu sisi mana yang akan ditonjolkan atau ditampilkan dan dihilangkan pada berita yang mereka buat.

Analisis *framing* saat ini terbagi dalam beberapa model yang dikemukakan oleh pakar – pakar yang berbeda. Menurut Robert N. Entman, *framing* merupakan proses penyeleksian beberapa aspek realitas menjadi bagian tertentu dari sebuah peristiwa yang akan lebih ditonjolkan daripada aspek lainnya. Penempatan informasi ke dalam konteks yang khas sehingga informasi tersebut mendapat alokasi yang lebih besar daripada informasi lainnya (Eriyanto, 2012).

Pakar lain yang mengemukakan konsep *framing* adalah William A. Gamson. Menurutnya, *framing* adalah bagaimana cara mengisahkan atau gugusan berbagai ide yang diorganisir sedemikian rupa sehingga menghadirkan konstriksi makna suatu peristiwa yang berkaitan dengan suatu objek wacana. Cara mengisahkan atau berverita dapat terbentuk dalam suatu kemasan yang merupakan struktur pemahaman yang digunakan untuk mengonstruksi makna pesan yang disampaikan dan menafsirkan makna pesan yang diterima (Eriyanto, 2012).

- Todd Gitlin juga merupakan salah satu pakar yang turut mengemukakan konsep *framing*. Menurutnya, *framing* adalah suatu strategi untuk membantu dan menyederhanakan realitas untuk ditampilkan kepada khalayak. Peristiwa yang ditampilkan tampak menonjol sehingga menarik perhatian khalayak. Hal tersebut dilakukan dengan menyeleksi, pengulangan, penekanan, serta presentasi suatu aspek dari realitas (Eriyanto, 2012).

Kemudian David E. Snow dan Robert Benford juga mengemukakan bahwa *framing* merupakan pemberian makna yang bertujuan untuk menafsirkan peristiwa dan kondisi yang masih relevan. Menurut mereka, *frame* dapat mengorganisir sistem kepercayaan individu dan dapat diwujudkan ke dalam kata kunci, anak kalimat, citra, sumber informasi, dan kalimat tertentu. Menurut Amy Binder, *framing* merupakan skema interpretasi yang digunakan untuk menempatkan, menafsir, mengidentifikasi, serta melabeli suatu peristiwa secara langsung dan tidak langsung. Menurutnya, *frame* dapat mengorganisir suatu peristiwa rumit ke dalam pola yang lebih mudah dipahami yang dapat membantu khalayak untuk memahami makna dari suatu peristiwa (Eriyanto, 2012).

Kemudian Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, atau dapat disebut Pan dan Kosicki, mengemukakan bahwa *framing* merupakan strategi konstruksi dalam memproses berita dengan menggunakan kode informasi dan menafsirkan suatu

peristiwa yang kemudian dihubungkan dengan rutinitas serta konvensi proses pembentukan berita (Eriyanto, 2012).

Pendekatan analisis *framing* oleh Pan dan Kosicki menggunakan membagi empat dimensi *framing*, yaitu sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. Empat dimensi ini dapat membentuk tema yang mengaitkan berbagai elemen semantik pada narasi berita dalam sebuah koherensi global (Wutun, 2018).

Dimensi sintaksis merupakan unsur yang lebih berhubungan dengan judul, *lead*, latar, pernyataan, opini, kutipan, serta pengamatan terhadap suatu peristiwa dalam susunan kalimat. Dimensi kedua adalah skrip yang merupakan unsur yang berhubungan dengan bagaimana cara jurnalis atau wartawan menceritakan sebuah peristiwa dan kemudian mengemasnya menjadi suatu berita. Dimensi ketiga ialah tematik yang merupakan unsur yang berhubungan dengan hubungan satu kalimat dengan kalimat lainnya yang dapat membentuk berita secara keseluruhan. Dimensi keempat yaitu struktur retorik yang merupakan unsur yang berhubungan dengan bagaimana jurnalis memilih perbendaharaan kata, grafik, serta idiom yang digunakan yang tidak hanya untuk mendukung tulisan (Eriyanto, 2012).

Penelitian ini menggunakan perangkat *framing* milik Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki karena untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah, yaitu pembingkai berita pada masing-masing media, maka harus setiap artikel harus diteliti mulai dari unsur sintaksis, skrip, tematik, dan retoriknya. Dengan meneliti setiap artikel menggunakan unsur-unsur tersebut, maka akan ditemukan bagaimana pembingkai yang dilakukan oleh masing-masing media. Dengan begitu, pembedahan artikel berita dengan perangkat *framing* milik Pan & Kosicki dapat menunjang penelitian ini sehingga rumusan masalah dapat terjawab.

2.2.7 Episodic dan Thematic Framing

Pada *framing* terdapat konsep yang dapat digunakan, yaitu *episodic framing* dan *thematic framing*. Shanto Iyengar dalam (Pinotoan & Wahid, 2020) mengemukakan kedua konsep tersebut dengan menjelaskan bahwa terdapat dua jenis *framing* yang dapat dilakukan oleh media dalam membuat pemberitaan

mengenai suatu peristiwa. Kedua jenis konsep *framing* tersebut kemudian dapat digunakan oleh media massa.

Menurut Iyengar, *episodic framing* merupakan cara membingkai berita yang berfokus pada kejadian atau peristiwa. Berita yang disajikan tidak mengandung konteks historis, budaya, maupun politik dari sebuah peristiwa. Dengan konsep ini, pemaknaan akan suatu peristiwa akan lebih terbatas sehingga kerangka kognitif yang diperlukan oleh pembaca atau khalayak yang dilakukan secara kritis akan hilang (Coghlan, 2012). *Episodic framing* juga merupakan *framing* yang dilakukan secara sekali saja di satu pemberitaan dan tidak ada kelanjutan dari pemberitaan tersebut yang dipublikasikan di artikel berita selanjutnya.

Sedangkan *thematic framing* adalah cara membingkai berita yang bersifat lebih interpretatif. Berita yang dikonstruksi menggunakan konsep ini secara konteks lebih luas dan mengandung unsur historis, budaya, dan politik (Coghlan, 2012). *Thematic framing* merupakan *framing* pemberitaan yang berkelanjutan dari satu artikel ke artikel berita seterusnya atau dapat berkembang sejalan dengan waktu.

Dari penjelasan di atas, kedua konsep *framing* tersebut dapat menjadi salah satu pendukung hasil dari penelitian ini. Kedua konsep tersebut dapat mendukung apakah dari masing-masing media memiliki latar atau menggunakan antara *episodic framing* atau *thematic framing*.

2.2.8 Anak Sebagai Kelompok Rentan

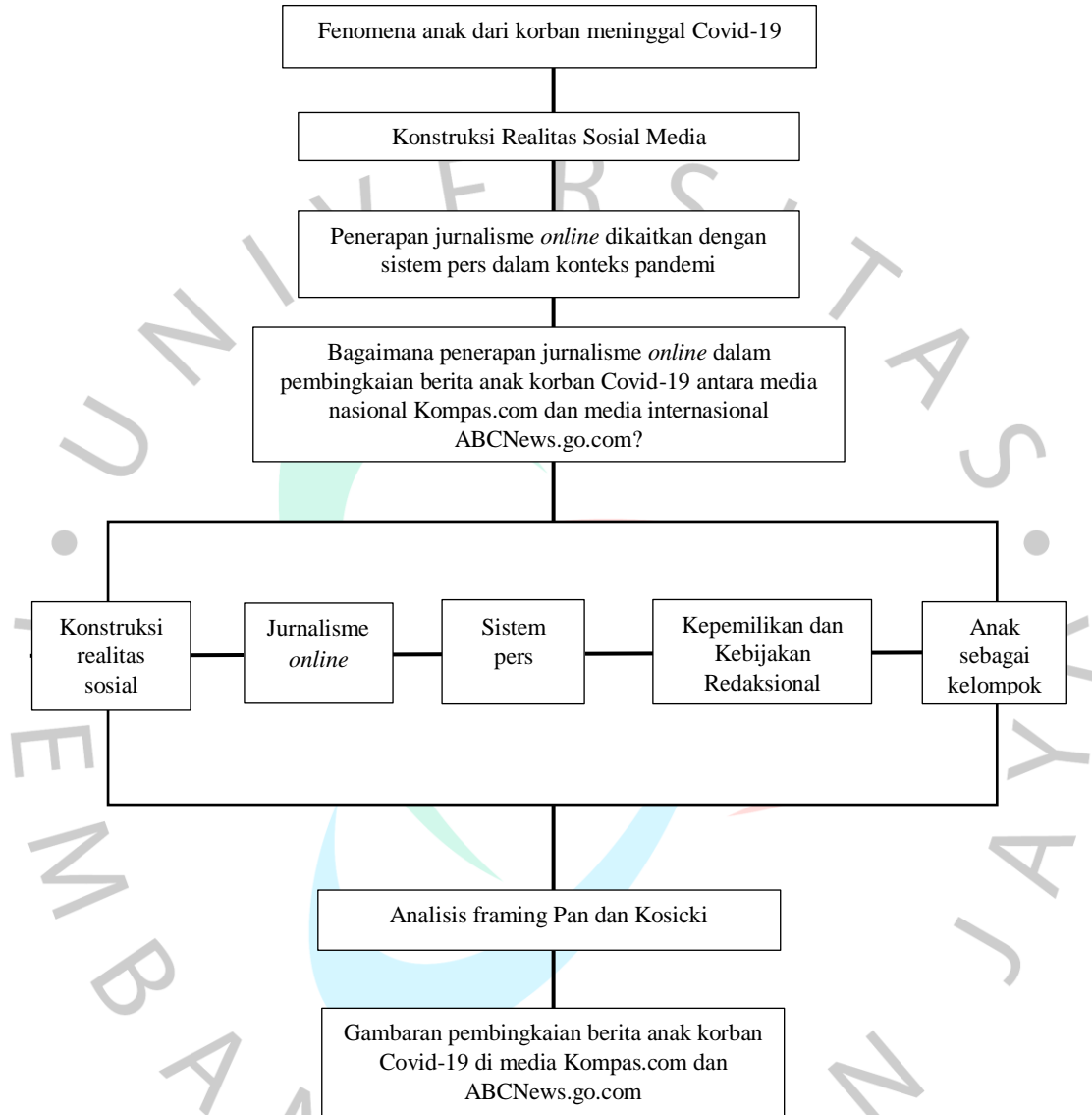
Kelompok rentan merupakan sekelompok orang yang tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri serta rawan dijatuhi pelanggaran hukum hingga diskriminasi (Dra.Rr.Widya, 2019). Maka dari itu, mereka yang termasuk ke dalam kelompok rentan membutuhkan bantuan baik dari masyarakat lain maupun pemerintah. Karena itu lah mereka disebut kelompok yang rentan yang terdiri dari beberapa kelompok yaitu, perempuan, anak-anak, usia lanjut, korban kejahatan, dan lain-lain.

Sebagai salah satu bagian dari kelompok rentan, pemberitaan mengenai anak-anak kemudian juga diatur dalam penyajiannya. Dalam membuat sebuah pemberitaan mengenai anak, terdapat prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam pembuatan berita. Berdasarkan pedoman yang dibuat oleh UNICEF yang dimuat di (UNICEF, 2018), berikut etika dalam melaporkan anak untuk pemberitaan;

1. Jangan menstigmatisasi anak terlampaui jauh; hindari kategorisasi atau deskripsi yang beresiko pada respon negatif termasuk kerugian fisik atau psikologis, atau pelecehan jangka panjang, diskriminasi atau penolakan oleh komunitas lokal mereka
2. Selalu gunakan konteks yang akurat untuk cerita atau gambar
3. Selalu mengganti nama dan identitas visual setiap anak yang diidentifikasi sebagai:
 - a. Korban pelecehan atau eksploitasi seksual,
 - b. Pelaku kekerasan fisik atau seksual,
 - c. Penderita HIV atau hidup berdampingan dengan AIDS, kecuali jika anak, orang tua atau wali memberikan persetujuan sepenuhnya,
 - d. Terdakwa atau tersangka yang dihukum karena kejahatan
4. Dalam keadaan tertentu yang berisiko atau berpotensi menimbulkan bahaya, mengubah nama dan mengaburkan identitas visual setiap anak yang diidentifikasi sebagai:
 - a. Seorang atau mantan pejuang (*combatant*) anak,
 - b. Pencari suaka politik, pengungsi atau orang
5. Dalam beberapa kasus, menggunakan identitas anak yang dapat dikenali digunakan demi kepentingan anak namun mereka tetap harus dilindungi dari bahaya dan didukung melalui stigmatisasi atau ancaman apa pun

Penelitian ini berfokus pada anak-anak sebagai subjek pemberitaan mengenai individu yang mengalami kerugian di masa pandemi, yaitu ditinggal meninggal oleh orangtuanya. Maka dari itu sebagai kelompok rentan, media dan jurnalis juga memiliki peran dalam menghormati hak yang dimiliki anak di media.

2.3 Kerangka Berpikir



Gambar 2 1 Bagan Kerangka Berpikir

Fenomena anak yang ditinggal meninggal orangtuanya akibat Covid-19 saat ini diberitakan oleh media yang didasar oleh konstruksi realitas sosial yang dibentuk oleh media. Dalam pemberitaan tersebut terdapat pula penerapan kaidah jurnalisme *online* yang berkaitan dengan etika jurnalistik dalam pembingkaiian peristiwa yang merupakan realitas, yaitu anak yang ditinggal orangtua akibat Covid-19 merupakan kejadian asli dan bukan merupakan rekayasa media. Dari fenomena tersebut kemudian muncul rumusan permasalahan, yaitu bagaimana penerapan konsep jurnalisme *online* dalam pembingkaiian berita anak korban Covid-19 dalam media nasional (Kompas.com) dan media internasional (ABCNews.go.com).

Untuk melengkapi jawaban untuk rumusan permasalahan tersebut, digunakan lima variabel yang dapat mendukung penelitian yaitu bagaimana konstruksi realitas sosial dibentuk, jurnalisme *online* (karena penelitian ini menggunakan media *online* sebagai subjek penelitian), penerapan sistem pers kedua media, penggunaan analisis *framing* sebagai metode analisis data, dan bagaimana memberitakan anak sebagai objek pemberitaan sedangkan anak merupakan kelompok rentan. Variabel tersebut kemudian akan dianalisa menggunakan perangkat *framing* milik Pan & Kosicki sehingga menghasilkan jawaban yaitu komparasi bagaimana kedua media tersebut menerapkan konsep jurnalisme *online* dalam pembingkaiian berita anak korban Covid-19.